

# Peranan Direktorat Penyidikan dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

## 知的財産権保護における捜査局の役割

- 
1. Dasar Pembentukan  
設置の法的根拠
  2. Tugas dan Fungsi  
任務と機能
  3. Undang-Undang dan Peraturan terkait  
関連法規
  4. Jenis Proses Penyidikan  
捜査プロセスの類型
  5. Statistik Laporan Pengaduan Pelanggaran HKI (2011 – Oktober 2013)  
知的財産権侵害通報統計 (2011年～2013年10月)
  6. Struktur Organisasi  
組織構成
  7. Proses Penyidikan Pelanggaran HKI - Persyaratan Pengaduan Pelanggaran HKI  
知的財産権捜査プロセス – 知的財産権侵害通報の要件
  8. Penegak Hukum dalam Penindakan Pelanggaran HKI  
知的財産権侵害取締における法的執行機関

## 1. Dasar Pembentukan

Direktorat Penyidikan terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor H-HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 pada tanggal 30 Desember 2010 dan mulai beroperasi secara efektif dan sepenuhnya sejak bulan April Tahun 2011.

## 2. Tugas dan Fungsi

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana terhadap kasus-kasus HKI.
2. Melakukan pemeriksaan administrasi yang terkait dengan kasus tindak pidana secara eksklusif di bidang HKI.
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari pihak pemberi informasi / pelapor.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran di bidang HKI.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bukti tertulis dan pada saat yang sama juga menginvestasikan dengan pejabat berwenang untuk mengukur semua barang bajakan.
6. Meminta bantuan dari ahli HKI atau bantuan ahli lainnya dari tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan.
7. Melakukan koordinasi dan membentuk gugus tugas operasional dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat operasi penyergapan ke lokasi yang mengindikasikan praktek-praktek pelanggaran HKI.

## 1. 設置の法的根拠

捜査局は2010年の法務人権大臣規則第H-HH.05.OT.01.01号に基づき、2010年12月30日に設置され、2011年4月から有効・本格的に活動を開始した。

## 2. 任務と機能

1. 知的財産権事件に対する刑事犯罪行為に関する通報または説明の事実について取り調べを行うこと。
2. 知的財産権分野における刑事犯罪行為事件に関する手続き上の取り調べを独占的に実施すること。
3. 情報提供者／通報者から説明と証拠物品を求めること。
4. 知的財産権侵害の刑事犯罪行為の疑義がある個人または法人に対する取り調べを行うこと。
5. 書面による証拠があると思われる特定の場において取り調べを行い、かつ同時に全ての模造品を調査するために権限のある官吏と共に捜査を行うこと。
6. 捜査任務の実施において知的財産権の専門家またはその他の専門家からのサポートを求めること。
7. 知的財産権侵害実施を示す場所へ抜き打ち捜査を行うためにインドネシア共和国国家警察と共に任務実施のタスクフォースを結成・調整すること。

### 3. Undang-Undang dan Peraturan Terkait

- a. Peraturan Umum:  
tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana
- b. Peraturan Khusus:
- UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Pasal16);
  - UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Pasal 53);
  - UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 41);
  - UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (Pasal 129);
  - UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Pasal 89);
  - UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Pasal 71)

### 4. Jenis Proses Penyidikan

- a. Tindakan Biasa / Delik Biasa  
Penyidikan dapat dilakukan tanpa harus adanya laporan / pengaduan masyarakat sebelumnya atau adanya temuan dugaan pelanggaran di lapangan (hak cipta).
- b. Tindakan Berdasarkan Laporan / Delik Aduan  
Penyidikan dilakukan berdasarkan laporan publik untuk kasus merek, desain industri, dan paten

### 3. 関連法規

- a. 一般法：  
文民捜査官に関するもの
- 刑法に関する法律 1981 年第 8 号、第 6 条(1) b 項、第 7 条(2)
- b.特別法
- 営業秘密に関する法律 2000 年第 30 号 (第 16 条) ；
  - 意匠に関する法律 2000 年第 31 号 (第 53 条) ；
  - 集積回路配置デザインに関する法律 2000 年第 32 号 (第 41 条) ；
  - 特許に関する法律 2001 年第 14 号 (第 129 条) ；
  - 商標に関する法律 2001 年第 15 号 (第 89 条) ；
  - 著作権に関する法律 2002 年第 19 号 (第 71 条) 。

### 4. 捜査プロセスの類型

- a. 通報を必要としない取締  
著作権侵害案件における捜査は、起訴状や通報を待たずに開始可能。
- b.通報に基づく取締  
商標、意匠および特許侵害案件に対する捜査は、一般的な通報に基づいて実施される。

## 5. Statistik Laporan Pengaduan Pelanggaran HKI (2011 – Oktober 2013)

### 5. 知的財産権侵害通報統計 (2011年～2013年10月)

Sejak dibentuk, Direktorat Penyidikan sudah menerima pengaduan langsung dari pemilik HKI yang merasa dirugikan atas pelanggaran HKI miliknya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

捜査局の設置以降、同局は自身の所有する知的財産権に対する侵害により損害を被ったとする知的財産権者からの直接的な通報を受理している。これに関する統計は以下の通り。

STATISTIK LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN HKI  
知的財産権侵害通報統計  
(2011年～2013年10月)

NO	年 / 月	PELANGGARAN HKI / 知的財産権侵害				JUMLAH 合計
		HAK CIPTA 著作権	PATENT 特許	MERЕК 商標	DESAIN INDUSTRI 意匠	
	2011	2	0	26	6	34
	2012	6	2	23	6	37
	2013					
	JANUARI / 1月	1	0	1	0	2
	FEBRUARI / 2月	1	0	1	0	2
	MARET / 3月	0	0	2	0	2
	APRIL / 4月	0	0	3	0	3
	MEI / 5月	2	0	1	0	3
	JUNI / 6月	0	0	1	0	1
	JULI / 7月	0	0	2	0	2
	AGUSTUS / 8月	0	0	0	0	0
	SEPTEMBER / 9月	0	0	2	0	2
	OKTOBER / 10月	0	0	2	0	2
	TOTAL / 合計	12	2	64	12	90
	(%)	13%	2%	71%	13%	100%

## 6. Struktur Organisasi

### 6. 組織構成



## 7. Proses Penyidikan Pelanggaran HKI

Pengaduan yang diterima oleh Direktorat Penyidikan akan melalui serangkaian proses sampai laporan tersebut bisa diserahkan kepada Kejaksaan.



## 7. 知財侵害捜査のプロセス

捜査局は、通報され代理人にレポートが提出されるまでの一連の手続を行う。

Persyaratan Pengaduan Pelanggaran HKI :

1. Copy KTP pelapor dan copy KTP saksi sebanyak 2 orang
2. Copy Sertifikat HKI dilegalisir
3. Surat kuasa jika diajukan oleh beberapa orang/kuasa
4. Surat Ahli Waris jika yang melaporkan ahli warisnya disertakan akta waris dilegalisir
5. Contoh produk asli dan produk yang diduga palsu serta kwitansi pembeliannya minimal 2 alat bukti

知的財産権侵害通報の要件:

1. 通報者の KTP (身分証明書) の写しおよび証人の KTP 写し。
2. 公認の知的財産権証書の写し
3. 複数人 / 代理人による通報の場合、委任状
4. 通報者が相続人の場合、相続人証明書を添付した公認の相続証。
5. 真正品と模造品のサンプルと購入時の領収書の証拠を 2 つ以上

## 8. Penegak Hukum dalam Penindakan Pelanggaran HKI

### 8. 知的財産権侵害取締における法的執行機関

1. Direktorat Penyidikan, DJHKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia  
法務人權省 知的財産権総局 捜査局  
住所 : Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9 (Ex-Kantor Imigrasi), Kuningan, Jakarta Selatan
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia  
国家警察  
住所 : Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan  
財務省 関税総局  
住所 : Jl. Ahmad Yani, Jakarta Timur
4. Kejaksaan Agung Republik Indonesia  
検察庁  
住所 : Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
5. Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia  
地方裁判所
6. Mahkamah Agung  
最高裁判所  
住所 : Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta



Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

法務人權省 知的財産権総局

<http://www.dgip.go.id>

Bekerjasama dengan :

協力 :

Japan International Cooperation Agency

国際協力機構